

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang mengalami transformasi besar dengan adanya relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ibu Kota baru ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas negara, tetapi juga sebagai cerminan dari kemajuan bangsa (Hadi & Ristawati, 2020). Ibu Kota memiliki fungsi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang dimana berbagai lembaga atau badan negara menjalankan masing-masing fungsinya. Ibu kota memiliki peranan penting dalam pembentukan citra internasional, sehingga kualitas suatu ibu kota negara akan mewakili negara tersebut (Herdiana, 2022).

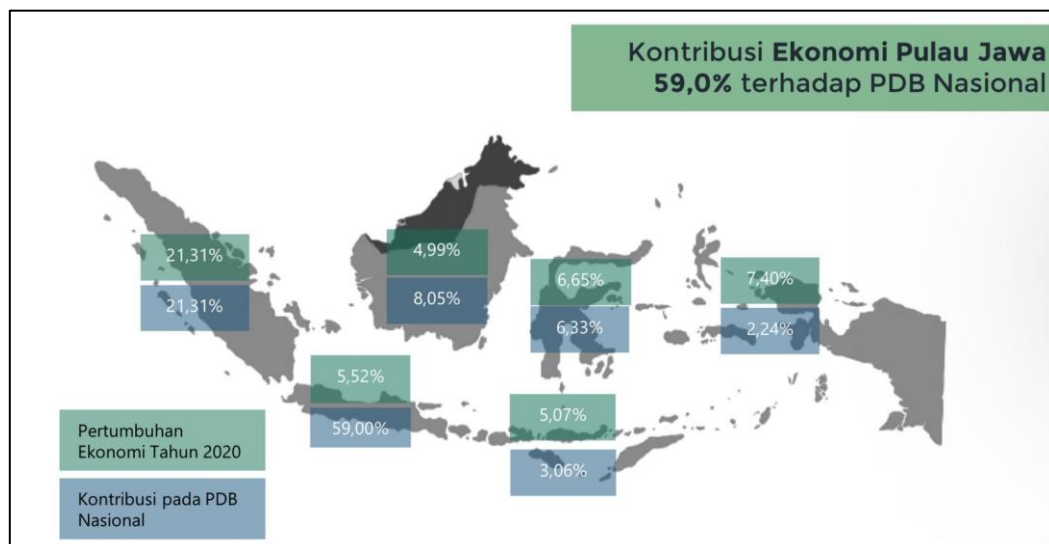
Pemindahan Ibu Kota Negara telah diwacanakan beberapa kali. Pertama kalinya pemindahan Ibu Kota Negara diwacanakan ialah pada tahun 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pemindahan ke Palangkaraya. Pada tahun 1997, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemikiran pemindahan ibu kota ke kawasan Jonggol muncul kembali. Kemudian pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki pemikiran pemindahan Ibu Kota ke Palembang (Aziz, 2019). Sampai pada tanggal 26 Agustus 2019, dalam rapat paripurna DPR yang menciptakan momen bersejarah, Presiden Joko Widodo menyatakan mengenai izin pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan (Saraswati & Adi, 2022).

Presiden dan pemerintah berencana menempatkan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS telah menyampaikan beberapa urgensi terkait relokasi Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Berikut ini merupakan urgensi-urgensi pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu Pertama, sesuai dengan Visi Indonesia

2045 yakni Indonesia Maju, diharapkan pada tahun 2045, perekonomian Indonesia akan masuk lima besar dunia. Oleh karena itu, mewujudkan Visi Indonesia 2045 memerlukan transformasi ekonomi. Hal ini dapat diperkuat oleh hilirisasi industri yang memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024. Oleh karena itu, diperlukan Ibu Kota Negara yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut (antaranews.com, 2024).

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata harus dimiliki Ibu Kota Negara, termasuk kawasan timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan daerah sekitarnya dikenali dengan pusat berbagai sektor seperti perdagangan, industri, pemerintahan, teknologi, budaya, investasi, dan masih banyak lagi. Luas wilayahnya 664,01 km, hanya 0,003% dari total luas wilayah Indonesia yaitu 1.919.440 km, peredaran uang di Jakarta mencapai hingga 70%. Sedangkan jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau sekitar 3,9% berasal dari jumlah masyarakat Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa (djkn.kemenkeu.go.id, 2022).

Gambar 1.1 Persebaran Ekonomi di Indonesia



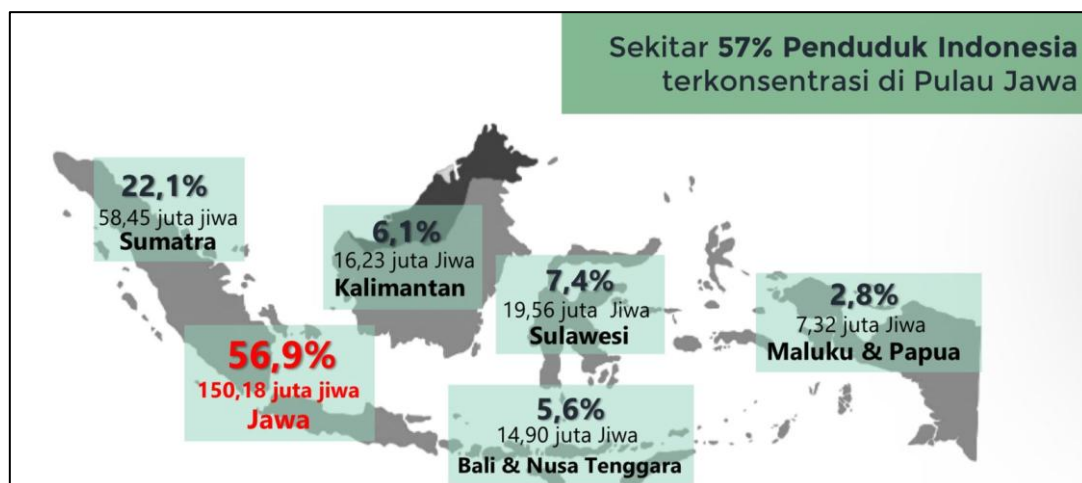
Sumber: Buku Saku Pemindahan Ibu Kota negara (2021)

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan lebih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Keadaan ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi

negara indonesia yang diupayakan berkelanjutan, belum maksimalnya pemanfaatan kemampuan daerah, tidak terjaganya keadilan antar daerah, dan rapuhnya persatuan dan solidaritas nasional. Maka dari itu, dibutuhkan Ibu Kota Negara yang memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan tersebut. Ibu Kota Negara di Kalimantan diharapkan menjadi pusat perekonomian baru Indonesia.

Ketiga, kondisi perkotaan Jakarta yang tidak layak lagi dijadikan Ibu Kota Negara Indonesia. Hal ini terlihat dari beban yang ditanggung Jakarta, seperti semakin padatnya jumlah penduduk dengan kepadatan 16.704 jiwa/km, sedangkan kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km.

Gambar 1.2 Persebaran Penduduk di Indonesia

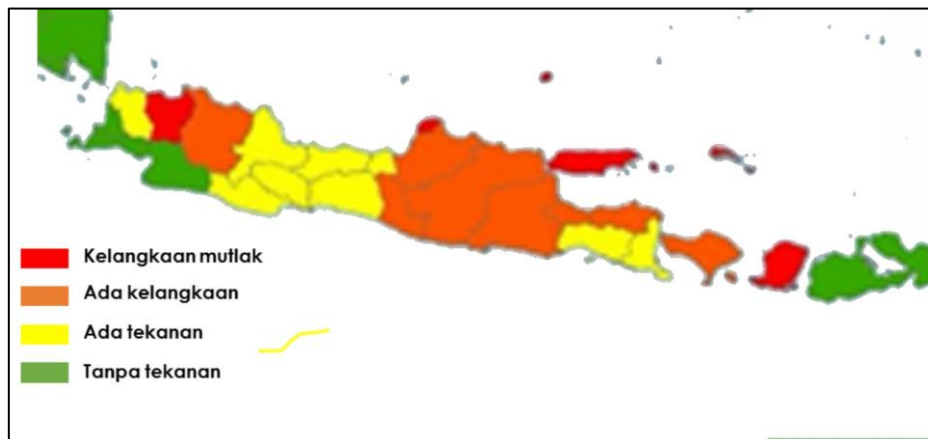


Sumber: Buku Saku Pemindahan Ibu Kota negara (2021)

Kemudian disusul dengan masalah kemacetan yang cukup buruk. Berdasarkan data TomTom Traffic Index (2020), Jakarta pernah menduduki peringkat 10 kota dengan kemacetan terburuk di bumi pada tahun 2019, namun peringkatnya turun menjadi peringkat 31 dari 416 kota besar pada tahun 2020.

Keempat, Pulau Jawa berhadapan dengan keterbatasan air yang parah. Daerah-daerah seperti wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna kuning yang menandakan tekanan pada ketersediaan air, terutama pada daerah Jakarta yang tergolong sangat serius.

Gambar 1.3 Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa



Sumber: Buku Saku Pemindahan Ibu Kota negara, 2021

Kelima, Jakarta memiliki persoalan geologi dan lingkungan yang parah. Permasalahan tersebut yaitu banjir tahunan dan penurunan permukaan tanah, yang menyebabkan beberapa kawasan di Jakarta turun ke bawah permukaan laut. Jakarta memiliki sekitar 50% risiko banjir, yang terjadi lebih dari sekali setiap 10 tahun. Tak hanya itu, wilayah Jakarta juga memiliki ancaman berupa aktivitas gunung berapi seperti Gunung Gede dan Krakatau, serta potensi tsunami dan gempa bumi (antaranews.com, 2024).

Beberapa persoalan tersebut menjadi alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kemudian disahkan DPR pada tanggal 18 Januari sebagai dasar hukum pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara. Dalam proses pembangunan IKN diperlukan panduan utama agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara (IKN) merupakan aturan turunan dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan IKN. Aturan ini menjabarkan secara rinci mengenai tahapan pembangunan, tata ruang, konsep lingkungan hijau, prinsip perekonomian, hingga skema pendanaan agar pembangunan IKN berjalan sesuai visinya yaitu “Kota Dunia untuk Semua”. Adapun periode pembangunan Ibu Kota Negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan periode

perencanaan jangka panjang hingga tahun 2045. Secara garis besar, pembangunan tersebut dibagi menjadi lima tahap, yaitu Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2045), dan Tahap 5 (2045 dan seterusnya).

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang sekarang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara, akan dilakukan di lahan seluas 256.142 hektare. Pusat pemerintahan utama (KIPP) akan terletak di Kecamatan Sepaku, yang mencakup area seluas 6.671 hektare. Lokasinya tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Lokasi untuk IKN baru didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu tingkat aksesibilitas yang tinggi, karena letaknya yang dekat dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai dua kota besar di Kalimantan Timur (Ariadi, 2023).

Dalam penelitian ini, Kota Balikpapan dijadikan sebagai lokus penelitian dikarenakan Kota Balikpapan merupakan daerah yang mendapatkan dampak, baik secara ekonomi maupun sosial dari adanya pembangunan IKN. Kota Balikpapan adalah beranda Kota Nusantara, sekaligus menjadi penyangga dan mitra Ibu Kota Negara. Beranda Kota Nusantara disini merupakan bagian depan gerbang masuk menuju Ibu Kota Negara. Kota Balikpapan juga merupakan tempat transit masyarakat dan kebutuhan pembangunan menuju IKN. Hal ini dikarenakan Balikpapan memiliki Pelabuhan Semayang untuk angkut penumpang, Kawasan Industri Kariangau yang mempermudah investor untuk mendistribusikan produk serta Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) (antaranews.com, 2024). Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2024-2043, yang dimana peraturan ini mendukung pembangunan IKN dengan peran Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara, serta sebagai pusat pertumbuhan nasional dan *superhub* ekonomi IKN.

IKN dirancang sebagai pusat ekonomi dan industri dengan fasilitas khusus untuk menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap area disekitarnya. Berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN akan menggunakan konsep superhub ekonomi (*economic superhub*). Konsep ini merupakan wajah perekonomian Indonesia dengan strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda). Kerja sama ini kemudian akan menjadi penguatan rantai nilai domestik di wilayah Kalimantan Timur. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda mempunyai peranannya masing-masing dalam pembangunan IKN yakni, Kota Balikpapan memegang peranan sebagai ‘otot’ pembangunan ekonomi Tiga Kota serta memperteguh peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional, sedangkan Kota Samarinda berperan sebagai jantung dengan pusat sejarah dan sektor energi terbarukan. Adanya pembangunan IKN juga diprediksi akan memberikan dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Kebijakan Pembangunan IKN memiliki tujuan salah satunya ialah untuk membangun pemerataan ekonomi daerah, khususnya wilayah timur. Dari kebijakan tersebut maka diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan. Hal ini sejalan dengan tekad strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia sehingga lebih merata dan mencapai pertumbuhan sosial ekonomi yang tepat (Yayuk Yuliati, 2003).

Pemerintah memainkan peran krusial dalam mendorong terciptanya suasana yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pengaruh dari sosial ekonomi ialah hasil dari interaksi bermacam faktor dalam masyarakat yang bisa memengaruhi kualitas hidup individu maupun komunitas. Pengaruh ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Manik, Nasution, & Safitri, 2025). Pendapat tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki

pengaruh terhadap dampak sosial ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Menurut Abdulsyani (dalam Setyorini & Syahlani, 2019), Status sosial ekonomi mengacu pada peringkat individu dalam suatu komunitas, dibentuk oleh faktor-faktor seperti kegiatan ekonomi, tingkat pendapatan, pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Pendapat tersebut menambahkan unsur-unsur yang memengaruhi sosial ekonomi seseorang. Lebih lanjut, Langumadi dan Harudu (dalam Maruwae & Ardiandiyah, 2020), berpendapat bahwa status sosial ekonomi suatu masyarakat tercermin dari pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, kesehatan, dan pekerjaan. Sejalan dengan Astrawan (2014), juga berpendapat sosial ekonomi mengacu pada peringkat seseorang dalam suatu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh kegiatan ekonomi, tingkat pendidikan dan pendapatannya. Oleh karena itu, sosial ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan jenis aktivitas ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara menciptakan pengaruh yang cukup besar bagi daerah disekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa positif maupun negatif, khususnya terhadap Kota Balikpapan sebagai kota penyangga dan mitra dari IKN.

Dampak yang positif mulai terlihat pada meningkatnya pendatang atau pengunjung dari luar pulau. Pembangunan IKN telah menyita banyak perhatian masyarakat untuk berkunjung dan melihat pembangunan yang sedang berjalan tersebut. Balikpapan merupakan tempat ‘transit’ untuk masyarakat agar bisa mengunjungi IKN. Peran Kota Balikpapan sebagai kota penyangga telah menyita perhatian masyarakat untuk berkunjung, menetap hingga mengadu nasib mengingat jarak pembangunan IKN yang tidak jauh.

Gambar 1.4 Berita Mengenai Peningkatan Sektor Perekonomian di Kota Balikpapan

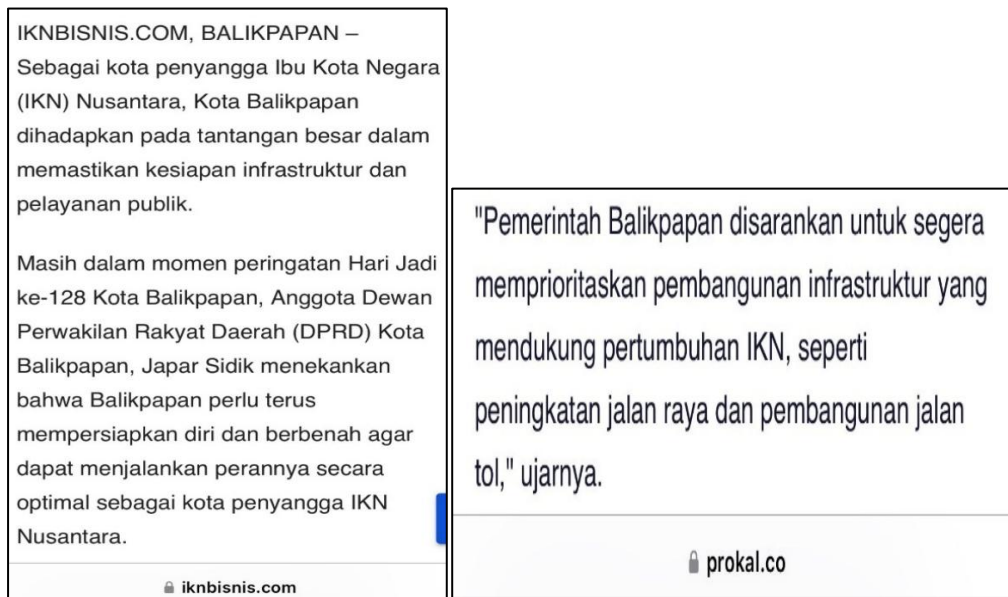


Sumber: kaltimtoday.co & jelajahekonomi.kontan.co.id (2024)

Lonjakan penduduk yang signifikan membawa dampak bagi perekonomian Kota Balikpapan. Peningkatan pada daya beli masyarakat dalam usaha barang maupun jasa terus berlangsung hingga memberikan peluang ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peluang ekonomi juga didapatkan oleh pemilik hunian seperti hotel, usaha kuliner, penatu, dan lainnya (newskaltim.com, 2023). Salah satu hotel yang mendapatkan imbas dari adanya pembangunan IKN ini ialah Swiss-belhotel Balikpapan, Nur Andy sebagai Executive Assistant Manager Swiss-belhotel Balikpapan menyatakan terjadi peningkatan pada hunian hotel sebanyak 70% yang kemudian terus meningkat menjadi sekitar 80% secara *year-to-date* (jelajahekonomi.kontan.co.id, 2024). Sektor-sektor perekonomian di Kota Balikpapan dapat bertumbuh pesat melihat dari adanya dampak positif yang didapatkan dari adanya pembanguana IKN.

Lonjakan penduduk yang datang maupun menetap di Kota Balikpapan menghadirkan tuntutan bagi pemerintah untuk segera menyusun program peningkatan infrastruktur, seperti pengembangan transportasi dan fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat.

Gambar 1.5 Berita Mengenai Persiapan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kota

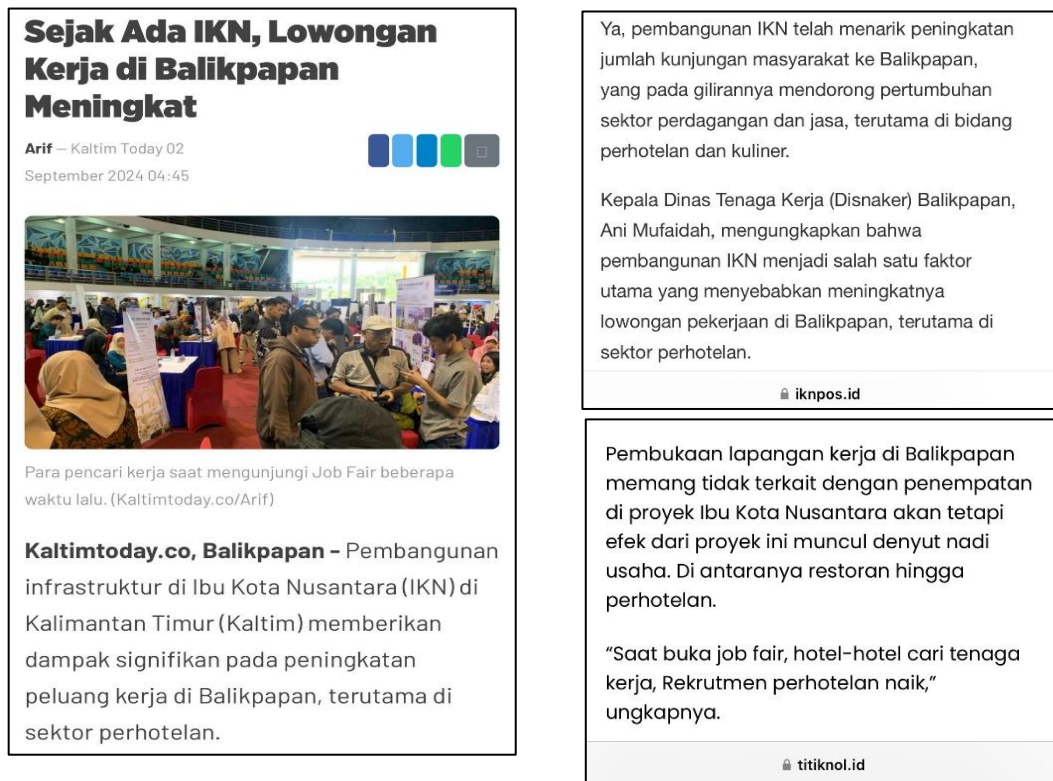


Sumber: IKNBisnis.com (2024) & Prokal.co (2023)

Kota penyangga IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik memiliki kualitas yang optimal sehingga dapat menanggung tantangan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pembangunan perlu dilakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi warga dalam beraktivitas, serta mendukung sektor ekonomi kota agar dapat beroperasi dengan lebih efisien. Pengoptimalan infrastruktur Kota Balikpapan mulai dilakukan dengan pelebaran dan membangun jalan baru, serta membangun jalan layang untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, pembenahan dan perbaikan drainase untuk penanganan persoalan banjir yang menjadi prioritas pemerintah (kaltimedia.com, 2024). Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi perhatian bagi pemerintah dan menjadi pengaruh yang baik bagi Kota Balikpapan.

Proyek besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara akan menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi kota penyangganya. Pembangunan IKN merupakan proyek yang sangat besar yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, terutama pada bidang konstruksi.

Gambar 1.6 Berita Mengenai Lowongan Kerja yang Meningkat



Sumber: Kaltimtoday.co, iknpos.id, & titiknol.id (2024)

Kota Balikpapan sebagai kota penyangga mendapatkan imbas dalam berbagai sektor, salah satunya pada tempat penginapan yang belakangan ini cukup banyak menerima permintaan kamar hotel sehingga tenaga kerja pada bidang perhotelan mengalami peningkatan (nomorsatukaltim.disway.id, 2024). Peningkatan lowongan kerja di Kota Balikpapan akibat adanya pembangunan IKN disetujui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan, Ani Mufaidah. Pembangunan IKN telah menarik kunjungan masyarakat untuk datang ke Balikpapan sehingga kemudian memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa (iknpos.id, 2024). Peningkatan ini dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat Kota Balikpapan serta menekan angka pengangguran yang ada.

Kota Balikpapan juga memiliki peluang investasi yang cukup tinggi setelah adanya pembangunan IKN. Relokasi Ibu Kota ke wilayah Kalimantan Timur menjadi pendorong

utama peningkatan minat investasi di Kota Balikpapan, terkhusus pada sektor perumahan, transportasi, dan kuliner.

Gambar 1.7 Berita Mengenai Pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan

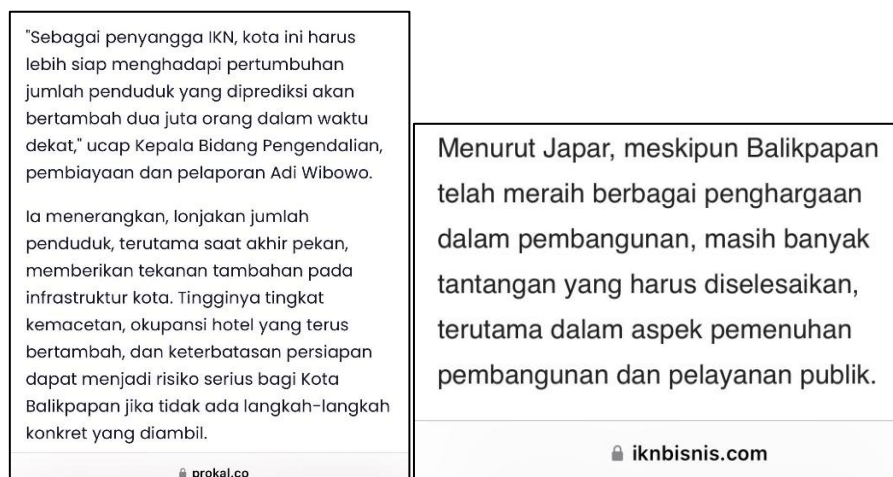


Sumber: Niaga.asia & Kompas.com (2024)

Peran Kota Balikpapan sebagai kawasan pendukung Ibu Kota Nusantara telah menarik minat investor untuk berinvestasi di kota tersebut. Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) mengakui adanya peningkatan investasi di Balikpapan, Hasbullah Helmi yang menyatakan bahwa salah satu sektor yakni sektor properti mengalami lonjakan besar akibat kebutuhan perumahan yang meningkat karena banyaknya pendatang baru yang bekerja atau terlibat dalam proyek IKN. Sebagai kota penyanggan IKN, Kota Balikpapan diprediksi akan terus menjadi magnet investasi di berbagai sektor (niaga.asia, 2024). Pertumbuhan investasi yang signifikan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih pesat di Kota Balikpapan.

Di sisi lain, rencana pemindahan IKN juga memiliki dampak negatif bagi Kota Balikpapan. Pembangunan IKN di Kalimantan memicu pertumbuhan populasi yang signifikan, khususnya Kota Balikpapan. Lonjakan jumlah penduduk ini dapat membawa konsekuensi langsung terhadap ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pelayanan publik. Kepadatan penduduk dengan jumlah yang tinggi dapat menimbulkan beban pada infrastruktur perkotaan, seperti layanan kesehatan, transportasi publik, dan pendidikan (Hayati, Rachma, Firmansyah, & Sari, 2023).

Gambar 1.8 Berita Mengenai Tekanan pada Infrastruktur Akibat Pertumbuhan Penduduk



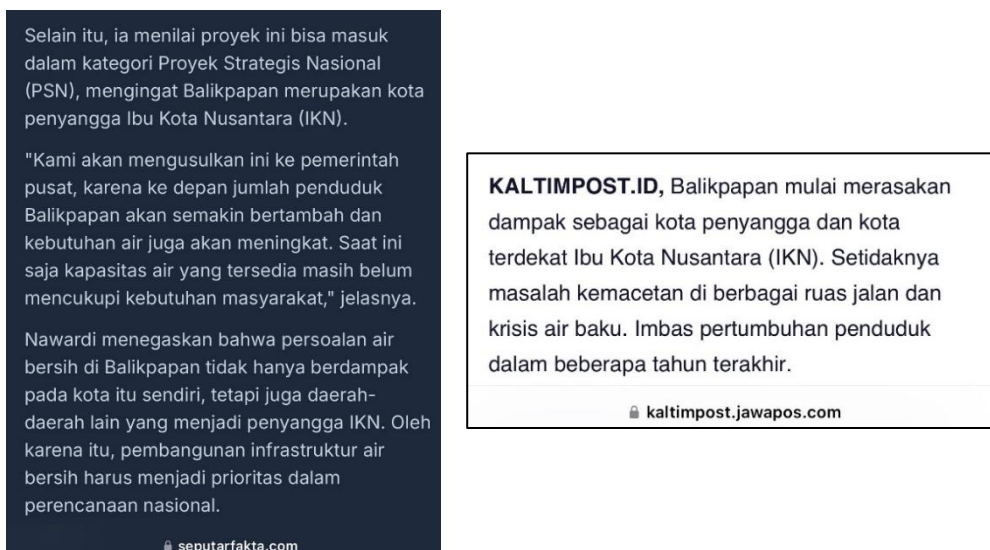
Sumber: prokal.co & iknbisnis.com (2024)

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memberikan tekanan pada infrastruktur kota. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga tekanan pada infrastruktur dan pelayanan dalam kota tidak semakin terbebani dan menyebabkan penurunan kualitas dan produktivitas masyarakat. Kondisi eksisting infrastruktur Kota Balikpapan masih dalam kategori lemah dan perlu ditingkatkan lagi (Lidyana & Dewanti, 2024). Berdasarkan laman berita Institut Teknologi Kalimantan (2024), peningkatan penduduk yang terjadi di Kota Balikpapan akibat adanya pembangunan IKN memberikan tekanan pada infrastruktur dan layanan kota. Kebutuhan semakin meningkat bagi perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat dipenuhi secara memadai. Hal ini kemudian menjadi persoalan yang sangat penting

untuk diselesaikan karena pembangunan IKN yang terus berlanjut diikuti dengan penambahan jumlah populasi yang semakin besar.

Populasi yang kian bertambah akan menimbulkan kebutuhan kota yang semakin bertambah pula. Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan memiliki potensi permasalahan dalam penyediaan air baku. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan persaingan untuk memperoleh sumber daya hingga menimbulkan risiko kelangkaan pada sumber daya tersebut, salah satunya yaitu ketersediaan air (Hayati, Rachma, Firmansyah, & Sari, 2023).

Gambar 1.9 Berita Mengenai Keterbatasan Air Baku di Kota Balikpapan



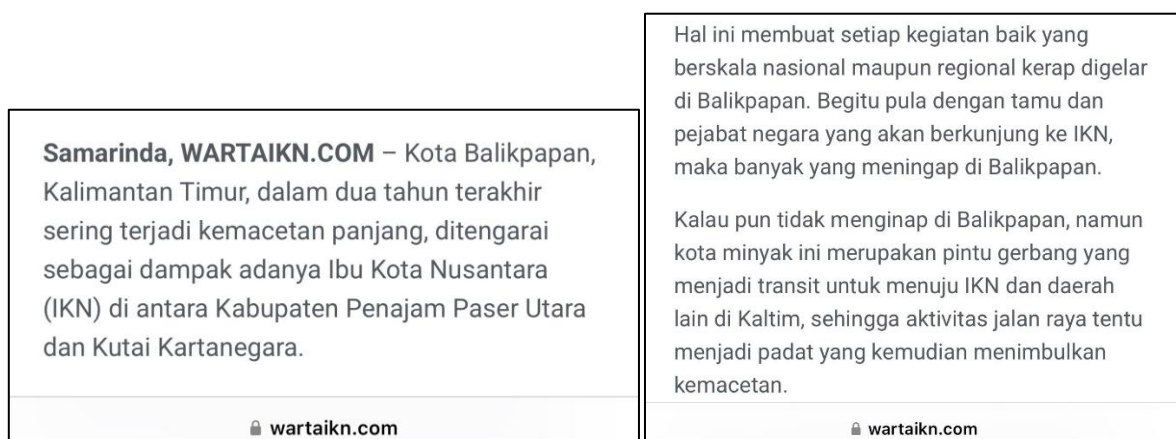
Sumber: seputarfakta.com & kaltimpost.jawapos.com (2024)

Kebutuhan air semakin bertambah seiring pertumbuhan penduduk yang masuk ke Balikpapan, di sisi lain kapasitas air yang ada di kota tersebut masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari hasil perhitungan oleh Lidyana & Dewanti (2024), penyediaan akses air bersih di Kota Balikpapan berada pada kondisi lemah. Akses air bersih di Kota Balikpapan mengalami keterbatasan air baku ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertumbuhan penduduk yang signifikan dan kebutuhan air bersih yang meningkat. Hal ini perlu

segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah dan tentu membutuhkan akses air bersih yang layak.

Pembangunan IKN telah menarik banyak pendatang, termasuk tenaga kerja maupun pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Hal ini berimbas pada peningkatan jumlah kendaraan di jalanan Balikpapan.

Gambar 1.10 Berita Mengenai Kemacetan yang Terjadi di Kota Balikpapan



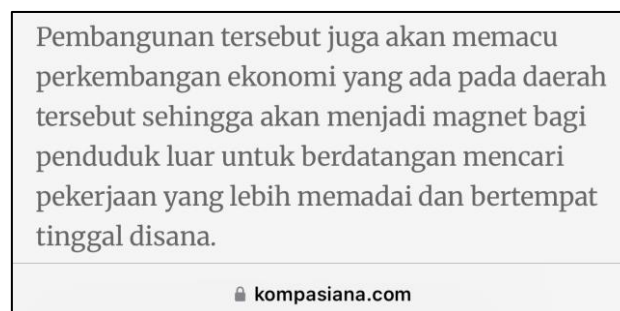
Sumber: wartaikn.com (2024)

Kota Balikpapan yang memiliki infrastruktur yang lebih lengkap sehingga dijadikan sebagai kota penyangga IKN membuat setiap kegiatan maupun acara-acara penting diadakan di kota ini. Aktivitas ini membuat jalan raya menjadi padat dan mengalami kemacetan, ditambah dengan kegiatan penduduk lokal yang beraktivitas sehari-harinya. Secara kalkulasi dari periode 2020-2022, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan telah bertambah rata-rata sebanyak 104.237 unit per tahunnya. Tingginya jumlah kendaraan ini dapat melampaui kapasitas jalan yang tersedia dan menyebabkan kemacetan yang parah. Mobilitas perkotaan di Kota Balikpapan memiliki penyediaan yang lemah, mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari (Lidyman & Dewanti, 2024). Titik kemacetan lalu lintas kendaraan di Balikpapan telah tersebar di beberapa titik, terutama di jalan MT Haryono dan Jalan Jenderal Sudirman (kaltim.tribunnews.com, 2023). Hal ini dapat menghambat proses perekonomian kota untuk berjalan dengan optimal. Sehingga dibutuhkan infrastruktur mobilitas perkotaan

yang memadai agar dapat mendukung pergerakan manusia, barang, dan jasa yang akan meningkat.

Adanya lonjakan populasi juga dapat menyebabkan tekanan besar pada pasar tenaga kerja lokal. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat migrasi seumur hidup ke Kalimantan telah bertambah sebanyak tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir (ekonomi.bisnis.com, 2023). Khususnya Kalimantan Timur yang berada diantara provinsi dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia.

Gambar 1.11 Berita Mengenai Penduduk Luar Berdatangan Mencari Pekerjaan



Sumber: kompasiana.com (2021)

Khususnya Kalimantan Timur yang berada diantara provinsi dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia. Lonjakan penduduk ini dapat berpengaruh bagi pekerja lokal yang berada di Balikpapan, yang sebelumnya memiliki akses lebih mudah ke lapangan pekerjaan dapat menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat dengan pekerja migran yang datang dengan keahlian atau pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat memicu ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama jika peluang kerja yang tercipta tidak mampu mengakomodasi jumlah tenaga kerja yang ada. Menurut Hayati, Rachma, Firmansyah, & Sari (2023), penduduk yang semakin tinggi akan menekan beberapa faktor, salah satunya ialah meningkatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan.

Relokasi Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya budaya-budaya luar ke masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dapat terjadi

pergeseran budaya (Mazda, 2022). Konsekuensi signifikan dari pemindahan ini adalah munculnya ketegangan sosial antara masyarakat adat dan pendatang, termasuk para pendatang dari daerah lain maupun dari luar daerah yang mungkin terpengaruh oleh pembangunan IKN. Masuknya pekerja dari berasal dari latar belakang budaya yang beragam akan membawa nilai dan budaya baru, yang dapat menimbulkan gesekan sosial. Menurut Christiani, dkk (dalam Sabiq, 2021), tingginya kepadatan penduduk dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kenpendudukan, salah satunya yaitu kriminalitas. Hal ini serupa dengan pendapat Sutanto (2022), yang mengatakan tantangan urbanisasi dapat menyebabkan masalah lain yang lebih kompleks, seperti ketimpangan sosial, konflik antar penduduk lokal dan pendatang, meningkatnya kemiskinan, permukiman kumuh, kejahatan dan kerusakan lingkungan.

Terdapat beberapa kasus tertentu yang terjadi di Balikpapan, salah satunya yaitu Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan mengindikasikan adanya peredaran narkoba yang meningkat seiring dengan adanya pembangunan IKN (Kompas.com, 2023). Selain itu, persoalan pertanahan tidak terlepas dari adanya konflik. Relokasi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur turut berdampak pada kenaikan harga tanah di sekitar wilayah IKN. Hal ini diakibatkan masyarakat yang dapat menerima manfaat dari rencana pemindahan IKN dengan pembelian sejumlah tanah oleh pemerintah. Harga tanah dilaporkan meningkat hingga 10 kali lipat di sejumlah daerah (CNBC Indonesia, 2022). Hal ini kemudian dapat menjadi konflik yang diakibatkan perbedaan dalam perspektif dan regulasi (kaltim.tribunnews.com, 2024).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah membawa dampak besar terhadap lingkungan, sosial, serta sumber daya alam disekitarnya. Terdapat suatu kawasan ekologis yaitu Teluk Balikpapan yang terdampak dari adanya IKN. Teluk Balikpapan

merupakan hunian bagi bekantan, pesut Mahakam, mangrove, dan bermacam-macam spesies lainnya. Keanekaragaman hayati tersebut mendapatkan dampak buruk dari adanya pembangunan IKN, setidaknya lebih dari 4 hektare mangrove di Teluk Balikpapan habis untuk dijadikan jalur perairan untuk alat-alat berat (aji.or.id, 2025). Hal ini menyebabkan dampak buruk pada ekosistem lingkungan yang ada di daerah tersebut dan juga konflik sosial karena dapat merampas sumber-sumber kehidupan warga hingga menyingkirkan ruang keanekaragaman hayati (tempo.co, 2024). Sehingga diperlukan adanya penyelesaian atau solusi dari persoalan tersebut agar tidak semakin memperburuk keadaan lingkungan maupun dengan masyarakat sekitarnya.

Dampak negatif maupun positif yang terjadi di Balikpapan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat. Dampak positif dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian kota serta stabilitas ekonomi keluarga dalam masyarakat, sebaliknya, dampak negatif dapat berpengaruh pada penurunan perekonomian serta stabilitas ekonomi keluarga dalam masyarakat diikuti dengan dampak-dampak lain yang tidak diinginkan. Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, disertai dengan daya beli masyarakat yang meningkat, tingkat kesejahteraan membaik, serta akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik menjadi lebih luas, yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih stabil dan kondusif.

Banyaknya persoalan yang terjadi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara ini memungkinkan terjadinya perubahan kondisi pada sosial ekonomi masyarakat yang berada di area sekitar pembangunan Ibu Kota Negara, khususnya Kota Balikpapan. Maka dari itu, penulis mengambil judul dari persoalan tersebut dengan judul penelitian ***“Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Balikpapan”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik Kota Balikpapan sebagai kota penyangga.
2. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan keterbatasan pada akses air baku Kota Balikpapan sebagai kota penyangga.
3. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan kemacetan pada jalanan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga.
4. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan tekanan bagi tenaga kerja lokal mencari pekerjaan di Kota Balikpapan.
5. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan konflik sosial dan kriminalitas antara penduduk luar dan penduduk lokal Kota Balikpapan.
6. Pembangunan Ibu Kota Negara menyebabkan persoalan lingkungan yang cukup serius di Kota Balikpapan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang ada, peneliti menyusun rumusan permasalahan yang dirancang dalam penelitian, yaitu bagaimana Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di Kota Balikpapan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan masukan serta menambah wawasan informasi baik bagi peneliti maupun pihak lain mengenai evaluasi pembangunan IKN pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi peneliti, penelitian ini bisa menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman yang luas dan bermanfaat mengenai evaluasi pembangunan IKN pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

1.5.2.2 Bagi Pembaca, penelitian ini bisa menyalurkan informasi dan ilmu yang bermanfaat mengenai evaluasi pembangunan IKN pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

1.5.2.3 Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan gambaran mengenai evaluasi pembangunan IKN pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti meninjau penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian tentang evaluasi pembangunan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pada daerah lain, mengingat bahwa penelitian mengenai dampak pembangunan Ibu Kota Negara bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan tidak ditemukan. Terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga dapat digunakan sebagai referensi, yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Bambang Tri Kurnianto/20 17/Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita	Mengkaji serta mengevaluasi pengaruh positif dan negatif dari pengembangan Lingkar Wilis terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Scott dan Mitchell mengenai dampak.	Kualitatif	Berdasarkan studi mengenai dampak sosial-ekonomi dari pengembangan jalur Lingkar Wilis di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo, beberapa poin utama dapat disimpulkan sebagai berikut: Aspek Sosial Mayoritas penduduk di kedua kecamatan bekerja sebagai peternak sapi perah dan petani. Potensi agrowisata semakin berkembang di beberapa desa, dengan beberapa destinasi yang telah dikelola secara profesional, sementara lainnya masih dalam tahap perencanaan. Struktur kelembagaan desa secara formal seragam sesuai dengan regulasi, tetapi efektivitas operasionalnya masih bervariasi. Dari segi sosial dan budaya, terdapat berbagai kelompok seni yang tetap aktif

					hingga saat ini, seperti jaranan, wayang kulit, dan reog gendang. Aspek Ekonomi Kekayaan sumber daya alam dalam bentuk lahan pertanian, kehutanan, dan peternakan berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang signifikan. Peternakan sapi perah menjadi sektor unggulan karena memberikan pendapatan utama bagi masyarakat. Upaya pengembangan nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih belum optimal. Pasar desa belum dimanfaatkan secara maksimal, dengan sektor perdagangan masih didominasi oleh toko kecil, warung, dan kios tradisional. Kecamatan Sendang didukung oleh koperasi tani Wilis, sementara di Kecamatan Pagerwojo, koperasi mengalami kendala manajerial. Berbagai potensi
--	--	--	--	--	---

					wisata lainnya masih dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan asli desa.
2.	Hasim As'ari, Zulkarnaini, dan Mimin Sundari Nasution/2017/Jurnal Ilmu Administrasi Negara	Menganalisis efektivitas pembangunan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses penguatan ekonomi, serta menentukan sektor pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Dunn (2003) mengenai evaluasi kebijakan	Kualitatif	Penelitian ini mengungkap bahwa pembangunan di wilayah 3T belum berjalan secara optimal, dengan berbagai kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat, termasuk nelayan, petani, dan pedagang.
3.	Lintang Ayu Pramesti Sekar Ningrum/2022/Jurnal Sosial Humaniora Terapan	Menganalisis dampak pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malang.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Lewwellen (1995), Larrin (1994), Kiely (1995) dalam Tikson (2005) mengenai pembangunan	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan ini membawa berbagai perubahan, terutama di sektor ekonomi. Peningkatan kapitalisasi masyarakat terjadi seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan yang

					memberikan manfaat finansial tambahan. Di sisi lain, perubahan sosial juga tampak dengan meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap budaya baru. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini menjadi faktor penting bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dari berbagai perspektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, karena dalam konteks pembangunan modern, masyarakat harus menjadi aktor utama dalam proses pembangunan.
4.	Amir Syarifuddin Kiwang & Farida M. Arif/2020/Gu lawendah: Jurnal Studi Sosial	Menjelaskan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Labuan Bajo sebagai konsekuensi dari perkembangan	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Biantoro & Ma'rif (2014)	Kualitatif	Studi ini mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di Labuan Bajo mengalami pertumbuhan yang signifikan, terlihat

		sektor pariwisata serta menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat setempat.	mengenai dampak sosial ekonomi		dari tren peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Lonjakan kunjungan ini turut mendorong perkembangan bisnis pariwisata dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, pariwisata juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi penduduk lokal. Dari sisi sosial, perubahan terlihat dalam pola gaya hidup masyarakat serta pergeseran orientasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata.
5.	Alif Puspita Dewi, dkk/2023/LP PM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	Mengevaluasi perubahan sosial dan ekonomi akibat pemindahan Teras Malioboro.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Fardani (2012:6) dan Cohen dalam Dwi (2015:21) mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi	Kualitatif	Penelitian ini mengungkap bahwa pemindahan PKL ke Teras Malioboro membawa dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pedagang. Salah satu konsekuensi utama adalah penurunan drastis dalam pendapatan mereka, yang memicu keluhan karena pemasukan terus menurun.

					Dari sisi sosial, perubahan lokasi berdampak pada pola aktivitas dagang, di mana sebelumnya transaksi berlangsung bebas di trotoar, kini pedagang harus beradaptasi dengan lokasi baru yang dianggap kurang strategis. Akibatnya, mereka harus berupaya lebih keras untuk menarik pelanggan. Sebagai respons, pemerintah telah menginisiasi berbagai program, termasuk pelatihan pemanfaatan teknologi dan pemasaran melalui platform digital.
6.	Happy Susanto/2020 /Majalah Ilmiah Bijak	Menganalisis serta menggambarkan pengaruh sosial-ekonomi dari pembangunan Bandara YIA serta merumuskan strategi pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Peet & Hartwick (2009:1-2) mengenai pembangunan	Kualitatif	Keberadaan YIA membawa perubahan signifikan bagi masyarakat sekitar, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi, pembangunan ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor bisnis, termasuk perhotelan, kuliner, jasa katering, serta penyediaan hunian seperti perumahan, kontrakan, dan

					kos-kosan. Namun, di sisi sosial, muncul tantangan baru akibat percampuran budaya yang terjadi serta meningkatnya kepadatan penduduk sebagai dampak langsung dari pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut.
7.	Abd Anab, Tahir Kasnawi, dan M. Ramli AT/2023/Jurnal Ilmiah MEA	Menganalisis pengaruh keberadaan kawasan industri terhadap kehidupan sosial dan ekonomi komunitas nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Abdul Syani (2007) mengenai sosial ekonomi	Kualitatif	Studi ini mengungkapkan bahwa keberadaan kawasan industri berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan. Dampak ekonomi tercermin dari peningkatan pendapatan serta kepemilikan aset yang lebih banyak. Sementara itu, dari sisi sosial, kesejahteraan masyarakat dapat diamati melalui aspek pendidikan dan perumahan. Tingkat pendidikan nelayan masih tergolong rendah, namun sebagian besar telah memiliki tempat tinggal yang layak.
8.	Asep Sugara/2018/Jurnal	Mengkaji dinamika sosial dan ekonomi	Teori yang digunakan adalah teori	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)

	Mozaik	masyarakat di area pembangunan pasar tradisional guna mengantisipasi potensi dampak yang merugikan.	yang diciptakan oleh Jayadinata (1999) mengenai kegiatan sosial ekonomi		Pembangunan Fresh Market Emerald telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, (2) Pasar ini berperan dalam memperkuat interaksi sosial, menjadi wadah bagi pedagang dan pembeli untuk membangun hubungan yang lebih erat, (3) Keberadaan Fresh Market Emerald memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, baik bagi pelaku usaha di dalam pasar maupun di sekitarnya, (4) Pasar ini juga berkontribusi dalam membuka peluang kerja bagi warga sekitar dengan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan.
9.	Edward Arnanda, Kurniawan, dan Arief Febrianto/2021/Jurnal Sumberdaya Perairan	Mengetahui pandangan nelayan mengenai aktivitas penambangan timah di laut serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi nelayan di Desa Matras.	Teori yang digunakan adalah teori yang diciptakan oleh Umarno (2014) mengenai pendekatan sosial	Kualitatif	Penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas penambangan timah di laut menyebabkan penurunan pendapatan nelayan hingga 56%, dengan rata-rata total pengeluaran

					mencapai Rp 3.400.000,- dan biaya operasional sekitar Rp 233.000,-. Penambangan di perairan Matras berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan wilayah tangkapan nelayan. Dari sisi sosial, terjadi ketegangan antara kelompok nelayan yang mendukung dan menolak aktivitas tambang, serta konflik dalam keluarga sebagian nelayan. Secara ekonomi, nelayan menghadapi kenaikan biaya bahan bakar dan perawatan alat tangkap, sehingga mereka harus berutang kepada pemilik modal atau mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
--	--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu yang ada pada tabel di atas mengangkat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan analisa dampak positif dan dampak negatif dalam aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dari suatu pembangunan atau pengembangan maupun kegiatan. Beberapa penelitian menggunakan evaluasi pembangunan untuk dapat menemukan dampak yang ingin ditemukan dari suatu pembangunan atau pengembangan. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu hanya mengidentifikasi sebuah dampak positif maupun negatif. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan maupun

pengembangan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat sekitar dengan menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif pada aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Pembangunan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat sekitar, seperti menaikkan ekonomi masyarakat dan mempererat hubungan sosial masyarakat. Akan tetapi, dampak negatif juga didapatkan dari pembangunan maupun pengembangan yang dilakukan. Sehingga hal ini kemudian dapat diatasi dengan melakukan perbaikan atau pembenahan kedepannya.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada lokasi serta teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini berfokus pada Kota Balikpapan, sebuah wilayah yang masih jarang menjadi objek kajian. Kemudian, penelitian ini mengangkat mengenai kebijakan pembangunan IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara. Persoalan ini masih cukup jarang dibahas oleh para peneliti lainnya, mengingat bahwa kebijakan pembangunan IKN merupakan kebijakan yang masih baru. Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1971) digunakan sebagai indikator evaluasi. Pemilihan teori ini didasarkan pada empat indikator evaluasi yang dapat memberikan penjelasan secara mendalam dan komprehensif dalam menilai kebijakan program pembangunan Ibu Kota Negara. Melalui teori ini dapat terlihat latar belakang, sumber daya yang dibutuhkan, proses keberlangsungan program dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat Kota Balikpapan. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Helmut Wollman (2020), yaitu tipe *On-going evaluation*. Tipe ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena mengingat bahwa program pembangunan Ibu Kota Negara yang masih berlangsung hingga saat ini, dan diprediksi akan selesai pada tahun 2045.

1.6.2 Administrasi Publik

David H. Rosenbloom (2005) menyatakan bahwa Administrasi Publik melibatkan penerapan teori serta proses manajerial, politik, dan hukum untuk mencapai tujuan pemerintah dalam sektor legislatif dan eksekutif, serta untuk menyediakan layanan dan regulasi kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Administrasi publik merupakan upaya kolaboratif individu atau organisasi dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah untuk secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan publik.

Gray (1989: 15-16), menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat terbagi menjadi 3, yaitu:

- Administrasi publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan nasional didistribusikan secara adil kepada orang-orang miskin.
- Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan properti, dan menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab bagi diri mereka sendiri di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan bagi para lansia.
- Administrasi publik berperan dalam melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat beragam dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan sumber-sumber dukungan agar nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, dan dapat terus hidup bersama secara damai, rukun, dan selaras dengan budaya-budaya lain yang ada di lingkungannya.

Dalam konteks politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nigro dan Nigro (1980: 14) yang menyebutkan bahwa: “Administrasi publik memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh sebab itu merupakan bagian dari proses politik. maka administrasi publik telah dilihat sebagai bagian yang sama pentingnya dari fungsi implementasi kebijakan

negara. Administrasi publik memiliki peran yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.” (Gordon, 1982: 82).

Paradigma Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (dalam Astuti, Warsono, & Rachim, 2020), yakni:

1. Paradigma I: *The Politics - Administration Dichotomy*, (1900-1926)

Paradigma ini mengasumsikan perbedaan antara peran politik dan pemerintahan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Administrasi publik yang efektif bergantung pada empat persyaratan utama: (1) perbedaan antara politik dan administrasi; (2) analisis komparatif organisasi politik dan swasta; (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik-praktik dan sikap seperti bisnis dalam operasi sehari-hari; (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, dan mendorong evaluasi berbasis prestasi. (Woodrow Wilson).

2. Paradigma II: *The Principles of Administration*, (1927-1937)

Paradigma ini membahas tentang prinsip-prinsip administrasi. Terdapat 7 prinsip administrasi yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) (Gulick dan Urwick, 1937). Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip administratif yang dipandang dapat diterapkan secara universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial-budaya. Pada tahap ini, fokus pada prinsip-prinsip administratif dipandang dapat diterapkan secara universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

3. Paradigma III: *Public Administration as Political Science*, (1950-1970)

Paradigma yang ketiga ini digambarkan oleh Henry sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (Henry, 2007). Dalam paradigma ini, ada keinginan kuat dari para ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian

dari ilmu politik. Dalam paradigma ini ada upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi yang pada saat itu kembali bertemu dengan ilmu induknya, yaitu ilmu politik, sebagai akibat dari perubahan dan pembaharuan.

4. Paradigma IV: *Public Administration as Management*, (1956-1970)

Periode ini dianggap sebagai kemenangan bagi para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik ke dalam ilmu manajemen. Dua disiplin ilmu, yaitu politik dan manajemen, bersaing untuk mendapatkan hak untuk mengakui bagian keilmuan administrasi publik.

5. Paradigma V: *Public Administration as Public Administration*, (1970-sekarang)

Tahap ini merupakan tahap “new public management” (NPM). Pada periode ini, administrasi publik didirikan sebagai bidang studi ilmiah yang otonom. Fokusnya diidentifikasi sebagai hirarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta. NPM juga menghadapi masalah ketidakefisienan dalam sistem administrasi. Hal ini berasal dari konsep yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal sebagai konsep “*governance*”.

6. Paradigma VI: *Governance*, (1990-sekarang)

Pada tahap ini, *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi orang dan institusi dan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. (Tamayao, 2014). Istilah “*governance*” digunakan untuk menggambarkan proses fundamental pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Proses politik

dipandang secara lebih luas sebagai proses di mana warga negara dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang penting. (Ikeanyibe, 2016).

Dalam penelitian ini memiliki perspektif paradigma VI : Governance, hal ini dikarenakan paradigma VI menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan adanya tata Kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, pembangunan IKN dapat dikelola secara berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil tanpa meningkatkan ketimpangan sosial.

1.6.3 Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988:107), Kebijakan publik melibatkan aplikasi strategis dari sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah untuk kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (Yuniningsih, 2019). Menurut W.N. Dunn (1994), Kebijakan publik adalah daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disiapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kejahatan, dan pembangunan perkotaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep kebijakan publik ini memiliki beberapa implikasi (Anderson, 1979: 3-4), yaitu:

- Pertama, titik perhatian kita dalam membahas kebijakan publik berorientasi pada niat atau tujuan dan bukan perilaku serampangan. Secara garis besar, kebijakan publik

dalam sistem politik modern bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan direncanakan oleh para aktor yang terlibat dalam sistem politik tersebut.

- Kedua, Kebijakan adalah arah atau pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dan bukannya keputusan perorangan. Sebuah kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk memberlakukan hukum atas suatu masalah, tetapi juga keputusan beserta implementasinya.
- Ketiga, Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat, dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika badan legislatif memberlakukan undang-undang yang mengharuskan pengusaha untuk membayar karyawan mereka sesuai dengan upah minimum yang diwajibkan, tetapi tidak ada yang dilakukan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sehingga tidak ada perubahan yang terjadi dalam perilaku ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik terkait kasus ini sebenarnya adalah kebijakan non-regulasi upah.
- Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif dan negatif. Di sisi positif, kebijakan dapat berupa tindakan definitif pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu. Sebaliknya, di sisi negatif, kebijakan publik dapat berupa pilihan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang membutuhkan intervensi pemerintah. Dengan kata lain, Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Kebijakan publik memiliki peran dalam mengatur dan mengarahkan dampak pembangunan IKN pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan. Dengan kebijakan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, dampak negated pembangunan dapat diminimalisir,

sedangkan manfaatnya dapat didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan evaluasi kebijakan yang efektif sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 229), Evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda: Yang pertama adalah menentukan konsekuensi dari sebuah kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, menurut William N. Dunn (2003), Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan dalam proses kebijakan publik, evaluasi merupakan cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program berjalan dengan baik atau tidak. Istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, “masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klasifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali” (Dunn, 2000: 29). Sehingga, evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian sistematis terhadap suatu kebijakan atau program, baik dari segi dampak yang ditimbulkan maupun tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dan menjadi dasar perbaikan atau pengembangan kebijakan di masa mendatang.

Model evaluasi kebijakan menurut Helmut Wollman (2007) terbagi menjadi 3 tipe, yaitu:

- *Ex-ante Evaluation*: tipe ini merujuk pada penilaian kebijakan yang dilakukan sebelum penerapan suatu kebijakan.
- *On-going evaluation*: bentuk evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk menilai dan mengukur dampak/hasil program yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi relevan yang sejalan dengan proses penerapan kebijakan.

- *Ex-post evaluation*: tahap ini merupakan bentuk penilaian kebijakan tradisional. Tahap ini melibatkan evaluasi sejauh mana tujuan telah terpenuhi dan dampak kebijakan yang diberlakukan.

Dalam penelitian ini, dengan program pembangunan IKN yang masih berjalan, maka model evaluasi kebijakan menurut Helmut Wollman adalah model *on-going evaluation*.

Terdapat beberapa model evaluasi kebijakan, yaitu *Goal Oriented Evaluation Model*, *Discrepancy Evaluation Model*, dan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) *Evaluation Model*. Dikembangkan oleh Ralph W. Tyler tahun 1951, model evaluasi berbasis tujuan menggunakan tujuan awal sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan. Evaluasi dicirikan sebagai proses pengukuran yang ditujukan untuk mengukur sejauh mana tujuan program telah terpenuhi. Penerapan model evaluasi berorientasi tujuan mengikuti urutan tertentu: (1) mengidentifikasi tujuan, (2) menerjemahkan tujuan tersebut menjadi indikator, (3) membuat metode dan alat untuk pengumpulan data, (4) mengonfirmasi bahwa program telah mencapai tujuannya, (5) mengumpulkan dan menganalisis informasi yang terkait dengan indikator program, (6) menentukan apakah tujuan telah tercapai sepenuhnya, tercapai sebagian, atau tidak tercapai sama sekali, dan (7) membuat keputusan yang tepat tentang program dan penerapan hasilnya (Faizin & Kusumaningrum, 2023).

Kemudian *Discrepancy Evaluation Model*, yang diciptakan oleh Malcon M. Provus, berfungsi sebagai kerangka evaluasi yang dirancang untuk menilai apakah suatu program harus dilanjutkan, ditingkatkan, atau dihentikan dengan menekankan definisi standar, kinerja, dan kesenjangan yang tepat dengan cara yang terukur. Proses evaluasi ini terdiri dari enam langkah: (1) membuat desain dan standar yang menguraikan berbagai karakteristik objek evaluasi, yang dapat berupa program, kebijakan, atau proyek; (2) merencanakan evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan, mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membandingkan implementasi aktual dengan standar kinerja yang ditetapkan; (3)

mengumpulkan data tentang kinerja objek evaluasi, termasuk hasil kuantitatif dan kualitatif; (4) menentukan kesenjangan antara standar implementasi dan hasil aktual, sambil menghitung rasio kesenjangan; (5) menganalisis alasan di balik kesenjangan antara standar dan kinerja objek evaluasi; dan (6) mengatasi kesenjangan dengan menerapkan perubahan pada pelaksanaan objek evaluasi (Wirawan, 2012).

Lalu terdapat definisi evaluasi menurut Daniel Stufflebeam, yaitu Evaluasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan penyajian informasi yang berharga untuk menginformasikan pengambilan keputusan atas alternatif-alternatif yang ada. Model penilaian CIPP, yang dikembangkan oleh Stufflebeam, berfungsi sebagai salah satu dari beberapa teknik untuk evaluasi program. Model CIPP ini mengkaji empat dimensi utama: Konteks, Masukan, Proses, dan Produk. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja berbagai dimensi program terhadap kriteria tertentu, yang pada akhirnya mengarah pada deskripsi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan program. Menurut Stufflebeam, model penilaian CIPP merupakan paradigma evaluasi menyeluruh dengan tujuan formatif dan sumatif. Fungsi sumatif evaluasi adalah untuk memperhitungkan hasil agar dapat menilai keberhasilan atau kelanjutan program, sedangkan fungsi formatif evaluasi adalah untuk memberikan pengetahuan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan program. Model CIPP memiliki orientasi yang bersifat proaktif yang memandu penetapan kebutuhan menetapkan tujuan, perencanaan, implementasi, kualitas hasil dan penekanan pada perbaikan yang berkelanjutan (Stufflebeam & Zhang, 2017). Evaluasi program menurut Stufflebeam terbagi menjadi empat dimensi, yakni sebagai berikut:

a) *Context Evaluation* (evaluasi konteks)

Bagian ini didefinisikan sebagai situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis tujuan dan strategi yang diterapkan dalam program. Konteks mencakup faktor-faktor seperti tujuan program, kebijakan terkait, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program

beroperasi. Tujuan dari evaluasi konteks adalah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan program, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan (Stufflebeam, dalam Hamid Hasan). Konteks evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh program, dan menetapkan tujuan program. Aspek ini berupaya menguraikan dan menguraikan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, serta tujuan proyek. Indikator evaluasi konteks menurut Suharsimi Arikunto (2010) yaitu; (a) dasar hukum, (b) latar belakang, dan (c) tujuan program.

b) *Input Evaluation* (evaluasi input)

Menurut Eko Putro Widyoko, evaluasi input ialah untuk membantu dalam menstrukturkan keputusan, mengenal pasti sumber yang ada, mempertimbangkan pilihan alternatif, merangka rancangan dan strategi untuk mencapai objektif, dan mewujudkan proses kerja untuk mencapainya. Dimensi ini juga agar dapat menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Selain itu, dimensi ini juga membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi input yaitu; (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana atau anggaran, dan (d) bagaimana prosedur atau aturan yang diterapkan.

c) *Process Evaluation* (evaluasi proses)

Esensi dari evaluasi proses ialah untuk memeriksa pelaksanaan suatu rencana atau program agar berjalan secara efektif dan efisien dengan mengidentifikasi permasalahan, menyesuaikan rencana serta melakukan peningkatan pada hal-hal tersebut (Stufflebeam & Shinkfield, 1985:173). Untuk mengidentifikasi masalah dalam suatu proses, baik itu kegiatan atau peristiwa, untuk menilai seberapa baik rencana telah dijalankan dan menentukan elemen mana yang memerlukan peningkatan. (Bachtiar, dalam Rama et al, 2023). Tujuan utama

evaluasi proses adalah untuk memverifikasi integritas proses. Setiap penyimpangan dari rencana awal akan diklarifikasi. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya dan digunakan selama pelaksanaan implementasi program. Terdapat indikator evaluasi proses yaitu; (a) kesesuaian waktu, (b) penilaian berkala, (c) partisipasi, dan (d) sosialisasi.

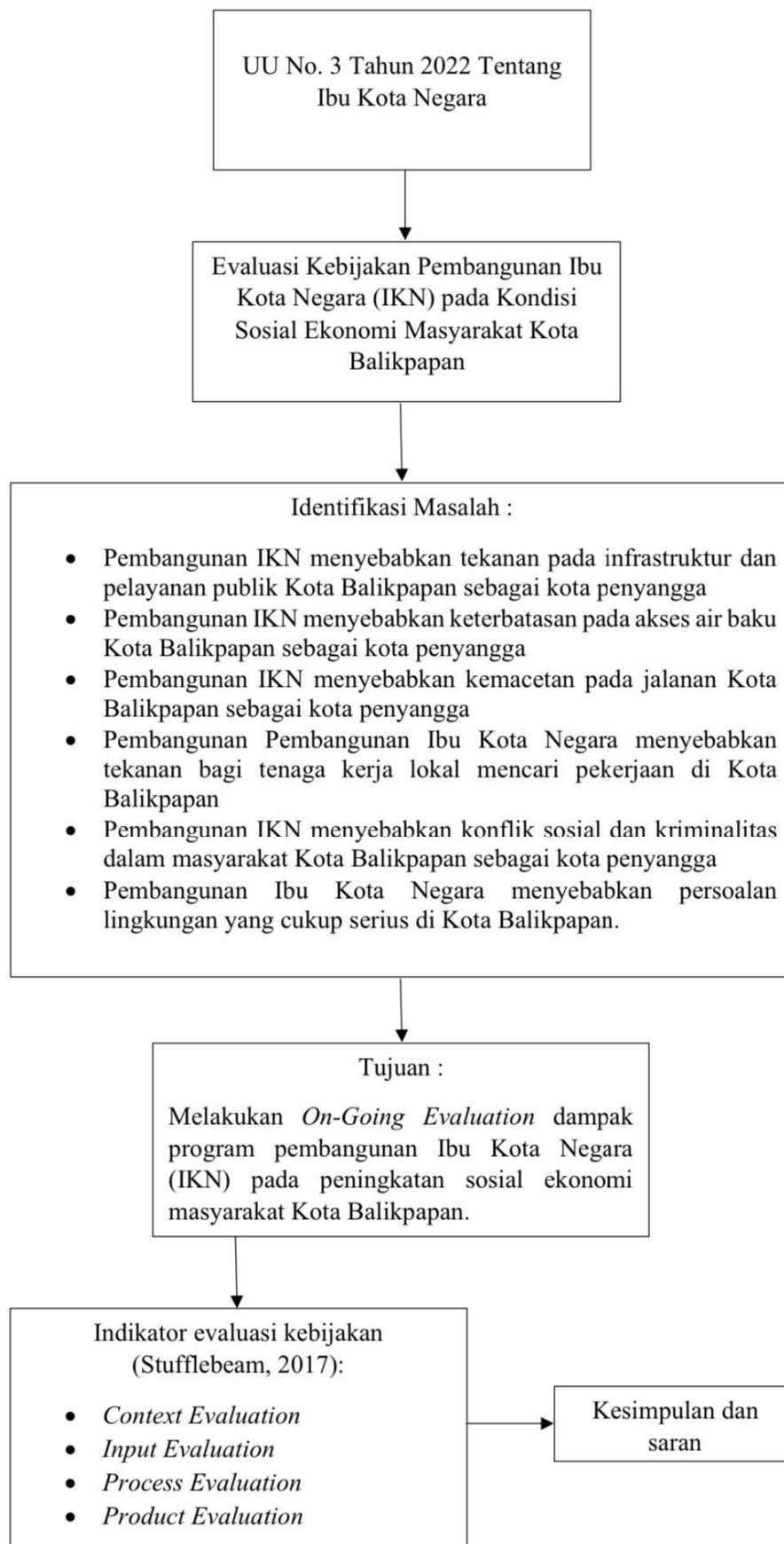
d) *Product Evaluation* (evaluasi produk)

Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menilai hasil dan manfaat, baik yang sudah direncanakan maupun yang tidak terduga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kurniawati, 2021). Dimensi ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis hasil dari suatu program, serta mengukur sejauh mana program tersebut berhasil memenuhi kebutuhan dari kelompok yang menjadi target. Dimensi ini akan memberikan wawasan tentang pencapaian tujuan, kesesuaian proses yang digunakan, ketepatan tindakan yang diambil, dan dampak keseluruhan program. Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berhenti, atau terdapat keputusan lainnya. Indikator evaluasi produk yaitu; (a) hasil atau dampak dari program dan (b) efektivitas program.

Dari beberapa model evaluasi kebijakan diatas, dalam penelitian ini akan menggunakan model evaluasi CIPP. Hal ini dikarenakan kedua model lainnya kurang cocok dalam penelitian ini. Model evaluasi berbasis tujuan kurang cocok karena tidak menilai proses secara mendalam dan kurang memperhitungkan faktor eksternal, seperti dalam pembangunan IKN melibatkan faktor sosial ekonomi yang kompleks dan sulit diukur hanya dengan pencapaian tujuan. Kemudian *Discrepancy Evaluation Model* lebih fokus pada perbandingan antara standar kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, dan hanya sekedar menilai kesenjangan antara rencana dan implementasi pada penelitian ini yang lebih menekankan pada dampak sosial ekonomi yang terjadi di Balikpapan.

Sedangkan model evaluasi CIPP dapat mengevaluasi kebijakan IKN dari tahap awal hingga hasil akhirnya, termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi dampak sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk memantau proses dan menilai perubahannya secara bertahap, mengingat kebijakan pembangunan IKN masih dalam tahap proses. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam sebagai kerangka untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang diterapkan.

1.6.5 Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi program ditujukan untuk menilai sejauh mana pencapaian Program pembangunan IKN dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari adanya Program pembangunan IKN pada sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan. Dalam mengukur keberhasilan program, perlu dikaji melalui beberapa indikator. Penelitian ini menggunakan indikator model evaluasi CIPP, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Indikasi Penelitian
Dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan, yang merupakan salah satu kota penyangga dari IKN. Fenomena ini mencakup perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat akibat peningkatang aktivitas pembangunan, migrasi penduduk, dan dinamika ekonomi maupun sosial yang terjadi akibat dari adanya pembangunan IKN	Context Evaluation: Kesiapan Kota Balikpapan dalam menghadapi dampak sosial ekonomi dari pembangunan IKN	Latar belakang pembangunan IKN dan Kota Balikpapan gerbang utamanya: • Latar belakang program pembangunan IKN • Visi misi dan tujuan dari pembangunan IKN • Peran strategis dan fungsi Kota Balikpapan dalam visi misi maupun tujuan pembangunan IKN
		Profil kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum pembangunan IKN: • Kondisi sosial ekonomi Kota Balikpapan sebelum adanya pembangunan IKN dan kesiapannya sebagai kota penyangga

		Potensi peluang dan tantangan bagi masyarakat Kota Balikpapan: • Pemanfaatan peluang yang dihadirkan dari adanya pembangunan IKN bagi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan • Potensi tantangan atau masalah yang dapat terjadi dalam sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan
	Input Evaluation: Sumber daya dan strategi yang disiapkan untuk mengelola dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat Kota Balikpapan	Kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan IKN: • Rencana strategis pemerintah untuk menghadapi perubahan akibat pembangunan IKN • Ketersediaan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja baru
	Process Evaluation: Pelaksanaan strategi dalam menghadapi perubahan akibat pemabngunan Ibu Kota Negara	Pemantauan aktivitas pembangunan dan program pemerintah: • Mengkaji proses pelaksanaan perencanaan pemerintah dalam menghadapi perubahan akibat adanya pembangunnn IKN • Perubahan yang terjadi pada masyarakat Kota

		Balikpapan sejak pembangunan IKN dimulai
	Product Evaluation: Dampak jangka pendek dan Panjang pembangunan IKN terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan	Dampak sosial ekonomi jangka pendek: • Peningkatan atau penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat • Perubahan pola interaksi sosial dan budaya yang dirasakan masyarakat lokal • Perubahan akses masyarakat terhadap layanan publik (transportasi, kesehatan, pendidikan)
		Dampak jangka Panjang: • Keberlanjutan manfaat ekonomi, seperti stabilitas pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah • Perubahan struktur sosial masyarakat lokal akibat urbanisasi dan migrasi penduduk
		Kepuasan masyarakat: • Persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan IKN • Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dampak pembangunan IKN

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan oleh beberapa dampak buruk yang telah terjadi di Kota Balikpapan sebagai akibat dari adanya pembangunan IKN serta keingintahuan peneliti untuk mengevaluasi pada Kebijakan Pembangunan IKN sehingga dapat mengetahui dampak sosial ekonomi pada masyarakat Kota Balikpapan. Kebijakan Pembangunan IKN dapat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Kota Balikpapan, hal ini dikarenakan Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang bagi IKN yang tentunya memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model evaluasi menurut Helmut Wollman (2007) yaitu model *on-going evaluation*. Model ini digunakan karena mengingat bahwa Kebijakan Pembangunan IKN merupakan kebijakan yang masih berjalan dan diperkirakan selesai pada tahun 2045. Untuk mengukur pengaruh Kebijakan Pembangunan IKN pada sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan, peneliti menggunakan indikator model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2011) yang terdiri dari empat indikator, yaitu *Context Evaluation*, *Input Evaluation*, *Process Evaluation*, dan *Product Evaluation*. Teori tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai pengaruh Kebijakan Pembangunan IKN pada sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Balikpapan” merupakan studi dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2007:3), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berusaha mengungkapkan pemikiran yang berbeda dari setiap individu mengenai suatu topik tanpa memberikan banyak arahan kepada mereka. Penelitian ini memiliki tujuan

untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pembangunan IKN pada masyarakat Kota Balikpapan.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyelidikan deskriptif ialah penyelidikan yang cuba menggambarkan gejala, peristiwa, atau fenomena yang sedang berlaku. Penelitian ini mengkonsentrasikan pada persoalan nyata yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung.

1.9.2 Situs Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu melakukan *On-Going Evaluation* pembangunan Ibu Kota Negara pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan dengan informan atau orang yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang ada pada lokasi penelitian. Informasi yang diberikan oleh informan berguna dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dengan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling untuk pengambilan sampel. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa *purposive* sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tertentu. Faktor ini bisa berupa individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti, atau seseorang yang memiliki posisi pengaruh yang dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Subjek dari penelitian ini berdasarkan pada judul penelitian

yaitu Otorita Ibu Kota Negara, Bappeda Litbang Kota Balikpapan, pelaku usaha atau bisnis, dan warga Kota Balikpapan.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini memerlukan berbagai jenis data dalam menunjang hasil penelitian. Untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Balikpapan”, maka akan menggunakan data-data yang sumbernya berasal dari penjelasan langsung oleh informan, pengamatan tindakan informan, hasil observasi, serta dokumentasi sebagai penunjang data. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif dari perolehan data-data di lapangan.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data berasal dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian (Wahidmurni, 2017). Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber secara langsung pada saat terjun lapangan. Data ini diperoleh melalui kata-kata, tindakan dan aktivitas dari para informan, yaitu masyarakat Kota Balikpapan.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian. Dalam studi ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, berita, dokumen, peraturan, serta situs web yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), metode pengumpulan data adalah langkah pertama dalam suatu studi. Dalam studi kualitatif, sumber data utama dikumpulkan dalam kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Wawancara

Untuk menjelaskan situasi dan fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung, wawancara akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang informan. Wawancara sendiri merupakan dialog antara dua orang dalam rangka bertukar informasi terkait topik tertentu melalui tanya jawab.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat suatu peristiwa secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan sebagai pelengkap data wawancara dan observasi dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan, berupa data yang tersimpan dalam *server* maupun *website*, aturan lembaga, perekaman hasil wawancara, pengambilan gambar, serta pendokumentasian arsip-arsip yang tersedia.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Nugrahani, 2014) dan melibatkan langkah-langkah analisis berikut:

- a. Pengumpulan data: menghimpun data-data di Kota Balikpapan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan strategi pengumpulan data yang dirasa tepat.

- b. Reduksi data: pemilihan, pendalaman, pengolahan, dan transformasi data kasar yang ada di lapangan untuk menghasilkan catatan-catatan yang mendetail.
- c. Penyajian data: data disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis mengenai keterkaitan kegiatan, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan Kesimpulan: penafsiran terhadap analisis dan interpretasi data dengan penyusunan pola pengarah dan sebab akibat yang mendukung jawaban permasalahan penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu mengkaji hasil penelitian dengan cara mewawancarai beberapa sumber kemudian membandingkannya dengan temuan observasi dan literatur (Sidiq & Choiri, 2019). Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil wawancara beberapa sumber dengan teknik pengumpulan data tersebut agar perolehan data dapat dilakukan pengecekan kembali hasil temuan untuk mendapat hasil yang terpercaya dan mencegah subjektivitas.